

## SEMINAR NASIONAL KOMPAK MENATAP OUTLOOK EKONOMI 2026 DAN MERACIK STRATEGI PENGAMANAN PENERIMAAN NEGARA



**Pembukaan Seminar KOMPAK disertai dengan launching buku "Cerita di Balik Pelatihan Coretax"**

### Executive Summary

Penerimaan negara sebagai pilar utama keberlanjutan fiskal menghadapi tantangan yang semakin kompleks menuju tahun 2026. Hal ini ditandai oleh adanya ketidakpastian global, perubahan struktur ekonomi, serta dinamika kepatuhan dan administrasi perpajakan. Realisasi pada tahun 2025 menunjukkan adanya tekanan pada penerimaan pajak meskipun kinerja bea cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) relatif optimal, sehingga menegaskan perlunya strategi yang lebih terarah, adaptif, dan berbasis evaluasi kinerja. Di sisi lain, optimalisasi penerimaan negara harus berjalan selaras dengan penciptaan iklim usaha yang kondusif dan penguatan struktur ekonomi domestik. Diskusi kali ini menyoroti pentingnya percepatan industrialisasi dari hulu ke hilir, perbaikan daya saing industri, serta penyederhanaan proses bisnis perpajakan untuk mendukung keberlangsungan usaha. Selain itu, penguatan kualitas belanja negara menjadi faktor penting agar kebijakan fiskal tidak hanya berorientasi pada target penerimaan, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, efektivitas strategi penerimaan negara sangat bergantung pada keterpaduan antara kebijakan fiskal dan kebijakan ekonomi, konsistensi dalam pelaksanaannya, serta sinergi antar pemangku kepentingan guna menjaga keseimbangan antara peningkatan penerimaan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam konteks ini, Seminar Nasional KOMPAK hadir untuk mendiskusikan pentingnya penguatan penerimaan negara melalui perluasan basis pajak, optimalisasi PNBP, serta transformasi digital sistem perpajakan seperti Coretax dan integrasi data lintas sektor. Pendekatan cooperative compliance juga menjadi paradigma baru dalam membangun hubungan kemitraan antara otoritas pajak dan wajib pajak guna meningkatkan kepatuhan, kepastian hukum, dan efektivitas administrasi.



### Opening Speech

Plt. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan  
Sudarto, S.E., M.B.A., M.Kom., Ph.D.

Plt. Kepala BPPK menekankan bahwa penguatan penerimaan negara di tengah kompleksitas ekonomi 2026 membutuhkan kolaborasi lintas pemangku kepentingan yang berkelanjutan, karena tidak dapat dilakukan secara sektoral. Dalam hal ini, BPPK sebagai *corporate university* Kementerian Keuangan berperan strategis dalam membangun kebijakan fiskal dan perpajakan berbasis pengetahuan, praktik terbaik, serta ekosistem pembelajaran kolaboratif seperti KOMPAK. Selain itu, transformasi digital dan dinamika ekonomi menuntut strategi yang adaptif dan presisi, termasuk melalui implementasi Coretax untuk meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan. Forum KOMPAK diharapkan menjadi wadah integrasi analisis, praktik, dan kebijakan yang menghasilkan insight berbasis *knowledge management* guna mendukung kebijakan fiskal yang lebih berkualitas, terkoordinasi, dan berkelanjutan.



**“Kolaborasi dan digitalisasi adalah kunci penguatan penerimaan negara”**

**Keynote Speech** oleh Wakil Menteri Keuangan  
Juda Agung, S.T., M.Sc., Ph. D

Wakil Menteri Keuangan menegaskan bahwa *outlook* penerimaan pajak menuju 2026 sangat dipengaruhi ketidakpastian global seperti konflik geopolitik dan fluktuasi harga energi, sehingga strategi fiskal harus adaptif dan tidak bergantung pada *windfall revenue* komoditas. Penguatan penerimaan diarahkan pada perluasan basis pajak yang adil, integrasi data lintas sektor, serta optimalisasi potensi ekonomi baru untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi. Upaya ini ditopang oleh empat pilar utama, yaitu penguatan basis penerimaan struktural, kepatuhan berbasis risiko dan data, keseimbangan penerimaan dengan pertumbuhan, serta transformasi SDM aparatur. Digitalisasi perpajakan dan integrasi data menjadi kunci peningkatan kepatuhan, sementara kualitas SDM tetap krusial untuk memastikan sistem perpajakan yang kredibel, berdaya saing, dan berkelanjutan di tengah tekanan global.

**“Penerimaan pajak yang kuat butuh strategi adaptif berbasis data, bukan ketergantungan pada windfall”**



**Keynote Speech** oleh Ketua Komisi XI DPR RI  
Dr. Muhammad Misbakhun, S.E., M.H.

Ketua Komisi XI menekankan bahwa pengembangan Coretax merupakan langkah strategis dalam mentransformasi sistem perpajakan Indonesia menuju tata kelola berbasis teknologi dan pengetahuan yang terintegrasi, sekaligus memperkuat kemandirian teknologi dan kepercayaan publik. Transformasi ini mencakup pemanfaatan teknologi seperti artificial intelligence dan potensi blockchain untuk meningkatkan pengawasan dan mendeteksi penghindaran pajak, serta didukung oleh dokumentasi historis reformasi perpajakan sebagai fondasi memori institusional. Lebih lanjut, keberhasilan penguatan sistem perpajakan sangat bergantung pada sinergi antara inovasi teknologi, pengembangan SDM, dan peran lembaga pendidikan sebagai pusat riset dan laboratorium kebijakan. Pusdiklat Pajak diharapkan mampu mengembangkan metodologi adaptif dalam menghadapi kompleksitas *tax avoidance* global, sehingga transformasi perpajakan tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat legitimasi institusional dan keberlanjutan penerimaan negara.



**“Transformasi perpajakan butuh sinergi teknologi, SDM, dan riset untuk memperkuat legitimasi dan keberlanjutan”**

**Resume Materi Staf Ahli Penerimaan Negara Bukan Pajak  
Mochamad Agus Rofiudin, S.Kom., M.M.**

Optimalisasi PNBPN menjadi salah satu strategi penting dalam memperkuat ketahanan APBN dan menjaga keberlanjutan fiskal di tengah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Dalam satu dekade terakhir, kinerja PNBPN menunjukkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh harga komoditas, volume produksi, serta kebijakan pemerintah, dengan kontribusi rata-rata sekitar 20,2% terhadap pendapatan negara. PNBPN tidak hanya berperan sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan untuk mendorong layanan publik yang inklusif, tata kelola pemerintahan yang transparan, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan barang milik negara, dan penguatan layanan badan layanan umum. Oleh karena itu, pengelolaan PNBPN diarahkan pada prinsip keadilan, keberlanjutan, dan optimalisasi, sejalan dengan amanat konstitusi untuk memanfaatkan sumber daya alam sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

**“PNBP bukan hanya sumber penerimaan, melainkan instrumen strategis untuk mengubah kekayaan alam dan layanan publik menjadi kekuatan fiskal yang berkeadilan, berkelanjutan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.”**



Ke depan, tantangan utama PNBP mencakup volatilitas harga komoditas, praktik ilegal seperti *illegal mining* dan *illegal fishing*, keterbatasan integrasi data, serta kualitas layanan yang belum merata. Menjawab tantangan tersebut, pemerintah menyiapkan peta jalan transformasi PNBP melalui penguatan kebijakan tarif, digitalisasi dan integrasi sistem, peningkatan pengawasan, serta sinergi lintas kementerian dan lembaga melalui *platform*.



Strategi ini juga menekankan pentingnya keseimbangan antara optimalisasi penerimaan dan keberlanjutan usaha, termasuk dukungan terhadap hilirisasi industri dan pelestarian lingkungan. Dengan transformasi yang berbasis regulasi, teknologi informasi, proses bisnis, dan penguatan SDM, PNBP diharapkan mampu menjadi pilar fiskal yang lebih adaptif, transparan, dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan nasional dan menjaga stabilitas APBN di tengah tekanan geopolitik dan ekonomi global.

### **Resume Materi Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto, S.E., Ak., M.B.A., Ph.D**

Di Tengah dinamika ekonomi global dan perubahan struktur ekonomi domestik, penerimaan negara mendapatkan tantangan yang tidak mudah. Evaluasi kinerja penerimaan pajak tahun 2025 menunjukkan bahwa secara bruto penerimaan pajak masih tumbuh sejalan dengan kondisi ekonomi, namun secara neto mengalami tekanan akibat pelemahan konsumsi dan profitabilitas korporasi yang berdampak pada meningkatnya restitusi. Target penerimaan pajak tahun 2026 yang mencapai Rp2.357,7 T menuntut pertumbuhan sebesar 22,9% dari realisasi 2025. Maka diperlukan upaya optimalisasi yang lebih terintegrasi melalui perluasan basis pajak, penguatan kerja sama data lintas instansi, dan peningkatan efektivitas reformasi perpajakan. Di sisi lain, tantangan global seperti proteksionisme, perang dagang, pergeseran ke ekonomi digital, dan keterbatasan basis wajib pajak yang aktif menjadi faktor yang harus diantisipasi dalam menjaga stabilitas penerimaan negara.



**“Strategi penerimaan pajak masa depan tidak lagi bertumpu pada penegakan semata, tetapi pada kemitraan berbasis kepatuhan dan integrasi data untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan keberlanjutan fiskal negara**”

Kinerja penerimaan pajak triwulan I tahun 2026 yang tumbuh 20,7% secara year-on-year menunjukkan sinyal positif dari kondisi ekonomi dan efektivitas strategi pengawasan serta pengelolaan restitusi yang lebih baik. Optimalisasi penerimaan pajak diarahkan pada peningkatan kepatuhan wajib pajak tanpa menambah objek pajak baru, melalui integrasi data, implementasi Coretax, penegakan hukum yang efektif, pemberian insentif perpajakan yang terukur, serta penyusunan regulasi yang berkeadilan dan berkepastian hukum.

Pendekatan baru berupa *cooperative compliance* menandai pergeseran paradigma dari *enforcement* menuju kemitraan berbasis manajemen risiko antara otoritas pajak dan wajib pajak, dengan tujuan meningkatkan kepastian pajak, menurunkan sengketa, serta menekan biaya kepatuhan. Dengan strategi ini, penerimaan pajak diharapkan tidak hanya meningkat secara kuantitatif, tetapi juga berkelanjutan, adaptif terhadap kompleksitas ekonomi modern, dan mampu mendukung ketahanan fiskal nasional.

**Amerika Serikat: Compliance Assurance Process (CAP)**

- CAP melakukan review real-time sebelum filing untuk kepatuhan lebih cepat.
- Pilot project di tahun 2005 → penerapan 2011 dimulai dengan 17 WP besar.
- Efektifitas mengadopsi program ini awal 2 USD 10 juta, tidak dalam lingkup tertentu.

**United Kingdom: Customer Compliance Management (CCM)**

- CCM untuk bisnis terbesar: membangun pemahaman mendalam, dan governance.
- Mengalokasikan sumber daya, risiko, dan pengetahuan.
- Tujuan pajak dibayar benar dan tepat waktu, dialog transparan.

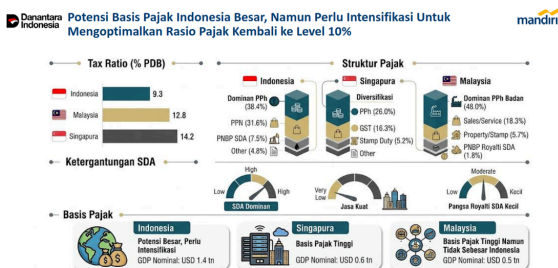
**Australia (ATO): Pre-Lodgement Compliance Review (PCR), dan Annual Compliance Arrangement (ACA)**

- PCR engagement pre-pelaporan untuk mengelola risiko material.
- Fokus transaksi signifikan & isu material sebelum pelaporan formal.
- ACA pengaturan assurance untuk memastikan kepatuhan praktis.

**Rancangan penerapan di Indonesia**

- 1 Fase awal: sukarela**  
Darahatkan untuk WP besar/kompleks yang ingin kepatuhan lebih tinggi melalui keterbukaan dan tata kelola pajak yang kuat.
- 2 Review real-time (sepanjang tahun)**  
DPR & WP menilai risiko: Tax Control Framework, transaksi signifikan, dan potensi beda tulis sebelum pelaporan formal.
- 3 Klasifikasi & perlakuan proporsional**  
WP masuk mendapat kepastian & beban pemeriksaan lebih ringan; fokus sumber daya ke risiko tinggi.

### Resume Materi Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro, S.E., M.A.



Optimalisasi penerimaan negara tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi makro dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam menghadapi outlook 2026 yang penuh ketidakpastian, baik akibat faktor global seperti geopolitik dan volatilitas harga komoditas, maupun faktor domestik seperti daya beli masyarakat dan biaya produksi, diperlukan kebijakan fiskal yang adaptif dan responsif. Penerimaan negara akan sangat dipengaruhi oleh kinerja sektor riil, sehingga menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung aktivitas usaha menjadi prasyarat utama dalam mencapai target penerimaan yang berkelanjutan.

- 
- 1 Perkuat Basis Pajak Domestik sebagai Anchor Utama**  
Mengoptimalkan peran PPh dan PPN sebagai pilar utama penerimaan, seiring upaya mengurangi ketergantungan pada komoditas
  - 2 Intensifikasi Pajak Secara Selektif & Berbasis Risiko**  
• Fokus pada high-income individuals, sektor jasa modern, dan ekonomi digital  
• OECD menunjukkan optimalisasi compliance lebih efektif dibanding kenaikan tarif
  - 3 Perluas Basis Pajak melalui Reformasi Struktural**  
Memperluas basis pajak melalui penguatan formalisasi ekonomi dan integrasi data
  - 4 Diversifikasi Sumber Penerimaan (Beyond Income Tax & SDA)**  
Mengembangkan sumber penerimaan non-income tax serta mendorong transformasi PNBP ke sektor non-komoditas
  - 5 Reformasi PNBP & Hilirisasi untuk Stabilitas Jangka Panjang**  
• PNBP SDA dominan, namun sensitif terhadap harga & kebijakan produksi  
• Arah kebijakan: value-added (hilirisasi) dan monetisasi aset negara

Di sisi lain, terdapat berbagai tantangan struktural yang perlu diatasi, antara lain tingginya sektor informal, terbatasnya basis pajak, serta melemahnya daya saing industri domestik. Kompleksitas regulasi dan beban biaya usaha juga menjadi faktor yang menghambat pertumbuhan dan kepatuhan wajib pajak.



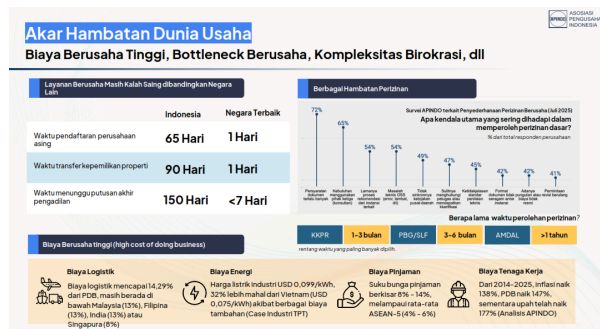
Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif melalui perbaikan administrasi perpajakan, perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif. Sinergi antara kebijakan fiskal dan kebijakan ekonomi menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara peningkatan penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

**“Optimalisasi penerimaan negara hanya dapat tercapai apabila didukung oleh kebijakan fiskal yang adaptif serta penguatan struktur ekonomi dan iklim usaha yang kondusif.**

**Resume Materi Ketua APINDO  
 Sinta W. Kamdani, B.A.**

Penerimaan negara yang kuat hanya dapat tercapai apabila perekonomian tumbuh secara stabil, sementara di sisi lain dunia usaha juga membutuhkan kondisi fiskal yang prudent untuk menjaga kepercayaan investor dan iklim investasi. Namun, outlook tahun 2026 dihadapkan pada berbagai tekanan, baik global maupun domestik, seperti eskalasi konflik geopolitik, kenaikan biaya energi dan logistik, volatilitas nilai tukar, serta penurunan kepercayaan pelaku usaha.

Dalam konteks ini, kebijakan perpajakan yang adaptif dan bersifat *counter-cyclical* diapresiasi sebagai langkah penting untuk menjaga daya tahan dunia usaha tanpa menambah beban di tengah kondisi ekonomi yang menantang.



Lebih lanjut, terdapat sejumlah tantangan struktural yang menghambat optimalisasi penerimaan negara, antara lain besarnya *underground economy*, tingginya sektor informal, melemahnya industri manufaktur, serta menurunnya kelas menengah yang selama ini menjadi tulang punggung konsumsi dan basis pajak. Selain itu, tingginya biaya berusaha, kompleksitas birokrasi, serta rendahnya daya saing dibandingkan negara lain turut mempersempit ruang ekspansi dunia usaha. Oleh karena itu, peningkatan penerimaan negara perlu didukung oleh perbaikan iklim usaha melalui kebijakan yang jelas, konsisten, adil, memperluas cakupan basis pajak, serta meningkatkan daya saing (*5C Framework*), sehingga tercipta keseimbangan antara optimalisasi penerimaan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

**“Penerimaan negara yang berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui sinergi kebijakan fiskal yang mendukung dunia usaha, dengan mengatasi hambatan struktural dan meningkatkan daya saing ekonomi secara menyeluruh”**



## DISKUSI

Diskusi menyoroti pentingnya optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai salah satu sumber penerimaan yang potensinya masih sangat besar. PNBP dinilai memiliki fleksibilitas tinggi, baik dari sisi objek maupun penetapan tarif, sehingga diperlukan roadmap kebijakan yang adaptif namun tetap menjaga stabilitas ekonomi. Pemerintah melalui Staf Ahli Bidang PNBP menegaskan bahwa strategi penguatan PNBP diarahkan pada peningkatan kontribusi terhadap PDB melalui perbaikan kebijakan tarif, percepatan regulasi, penguatan pengelolaan piutang, serta peningkatan fungsi pengawasan. Selain itu, transformasi tata kelola dilakukan melalui standarisasi layanan dan penerapan mekanisme *reward and punishment*, dengan fokus pada sektor strategis seperti sumber daya alam, tanpa mengabaikan prinsip keberlanjutan ekonomi.



**“Optimalisasi PNBP memerlukan roadmap kebijakan yang adaptif, penguatan tata kelola, serta fokus pada sektor strategis agar kontribusinya terhadap PDB meningkat secara berkelanjutan.”**



Selanjutnya, pembahasan mengarah pada penguatan integrasi sistem melalui konsep *single profile*, yang bertujuan menyatukan data pelaku usaha lintas sektor, termasuk perpajakan, kepabeanan, dan PNBP. Implementasi konsep ini didukung oleh pengembangan sistem *single sign-on* dan integrasi data antar kementerian/lembaga, termasuk otoritas moneter dan sektor keuangan. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administrasi, memperkuat pengawasan, serta menutup potensi kebocoran penerimaan negara melalui pemanfaatan data yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

**“Integrasi sistem melalui *single profile* dan sinergi kebijakan fiskal-ekonomi menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi, kepatuhan, dan ketahanan penerimaan negara di tengah tantangan global dan struktural.”**

Di sisi lain, diskusi juga menggarisbawahi tantangan eksternal dan struktural yang memengaruhi penerimaan negara, seperti volatilitas global akibat konflik geopolitik, kenaikan biaya energi dan logistik, serta melemahnya daya beli masyarakat. Kondisi ini diperparah oleh ketimpangan struktur ekonomi dan rendahnya daya saing industri domestik, yang berdampak pada terbatasnya basis pajak. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif melalui pendekatan cooperative compliance untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, perluasan basis pajak secara persuasif, serta perbaikan fundamental ekonomi melalui industrialisasi dan peningkatan daya saing. Sinergi antara kebijakan fiskal, perbaikan administrasi perpajakan, dan penciptaan iklim usaha yang kondusif menjadi kunci dalam mendorong penerimaan negara yang berkelanjutan.

### INSIGHT

Satu benang merah utama dalam seminar kali ini adalah desain kebijakan pemerintah dalam optimalisasi penerimaan negara perlu diarahkan pada penguatan basis pajak yang baru. Namun demikian, kebijakan tersebut tidak dapat berdiri sendiri. Seperti disampaikan oleh pelaku usaha, kebijakan fiskal juga harus mempertimbangkan iklim usaha yang kondusif serta mampu mendorong peningkatan investasi. Lebih lanjut, ditekankan bahwa konsistensi implementasi kebijakan dan kepastian hukum menjadi faktor kunci dalam menjaga kepatuhan wajib pajak. Aspek keadilan dan *fairness* dalam *compliance* juga perlu diperhatikan agar kepercayaan pelaku usaha tetap terjaga.

**“Optimalisasi penerimaan negara tidak cukup hanya dengan memperluas basis pajak, tetapi harus diiringi kebijakan fiskal yang konsisten, adil, dan memberikan kepastian hukum, serta mampu menjaga iklim usaha agar pertumbuhan ekonomi tetap inklusif dan berkelanjutan sehingga penerimaan meningkat secara alami.”**

Pada akhirnya, penerimaan pajak memang berperan sebagai motor utama pembangunan, tetapi kebijakan penerimaan negara harus tetap selaras dengan upaya menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Jika pertumbuhan ekonomi terjaga dengan baik, maka penerimaan negara akan meningkat secara alami dan berkesinambungan.



## SARAN DAN REKOMENDASI

- Pertama, perlunya memperkuat strategi perluasan basis penerimaan negara secara berkelanjutan melalui optimalisasi penerimaan negara dan peningkatan kepatuhan pajak. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong implementasi pendekatan *cooperative compliance*, pemanfaatan data terintegrasi melalui konsep *single profile*, serta penguatan fungsi pengawasan berbasis risiko. Di saat yang sama, kebijakan tarif PNBPN perlu dirancang lebih adaptif terhadap karakteristik sektor dan kondisi ekonomi, agar optimalisasi penerimaan tidak menimbulkan distorsi atau kontraksi.
- Kedua, percepatan transformasi digital dan integrasi sistem lintas sektor menjadi prioritas untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan menutup potensi kebocoran penerimaan. Implementasi sistem seperti Coretax, *single sign-on*, dan pertukaran data antar kementerian/lembaga perlu dipastikan berjalan secara konsisten, didukung oleh kesiapan infrastruktur, regulasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- Ketiga, pemerintah perlu memperkuat kebijakan struktural yang mendukung peningkatan daya saing ekonomi domestik sebagai fondasi utama penerimaan negara. Upaya ini mencakup percepatan industrialisasi hulu-hilir, pengurangan ketergantungan impor bahan baku, serta perbaikan biaya logistik, energi, dan pembiayaan. Selain itu, optimalisasi perjanjian perdagangan internasional dan peningkatan akses pasar ekspor juga menjadi langkah penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas basis pajak secara alami.
- Keempat, perbaikan iklim usaha harus menjadi bagian integral dari strategi penerimaan negara. Pemerintah perlu menyederhanakan proses bisnis perpajakan, mempercepat layanan seperti restitusi, serta memastikan konsistensi dan kepastian regulasi. Hal ini penting untuk menjaga cash flow dunia usaha, meningkatkan kepercayaan pelaku usaha, serta mendorong kepatuhan sukarela dalam jangka panjang.
- Kelima, diperlukan penguatan koordinasi dan keselarasan kebijakan antar pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Forum seperti Seminar KOMPAK perlu terus dimanfaatkan sebagai ruang dialog strategis untuk menyamakan persepsi, mengidentifikasi permasalahan implementasi, serta merumuskan solusi yang konkret dan aplikatif. Dengan kolaborasi yang kuat, diharapkan kebijakan penerimaan negara dapat diimplementasikan secara efektif, selaras dengan tujuan pembangunan nasional, dan mampu menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- Keenam, penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci dalam mendukung transformasi penerimaan negara yang berbasis data dan kolaborasi. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan kompetensi di bidang data analytics dan data integration, serta penyesuaian kurikulum dan program pelatihan yang selaras dengan pendekatan data-driven dan *cooperative compliance*. Dengan demikian, transformasi kebijakan dan sistem yang telah dirancang dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan.